

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **VI.1 KESIMPULAN**

Dinamika hubungan bilateral antara Indonesia dan China yang telah berlangsung sejak era tahun 1950an hingga peresmian kemitraan strategis oleh kedua pemimpin bangsa di tahun 2005, berjalan secara dinamis. Meskipun sempat mengalami keretakan hubungan yang berakhir dengan pembekuan hubungan diplomatik yang berlangsung pada era presiden Soekarno pasca peristiwa G30s/PKI hingga diupayakan normalisasi pada akhir era presiden Soeharto. Seiring dengan pergantian kepemimpinan presiden di Indonesia, maka melalui kebijakan- kebijakan yang diterapkan sehingga hubungan kedua negara semakin mengalami perkembangan positif. Semakin berkembang dengan banyaknya perdagangan bebas yang dilakukan diantara keduanya yakni ekspor-impor. Pada kegiatan ekspor yang dilakukan oleh Indonesia pada produk pertanian yakni buah manggis yang telah diekspor ke Tiongkok sebagai satu Negara yang menjadi tujuan utama ekspor Indonesia. Ekspor buah yang dilakukan Indonesia telah dicatat oleh badan kementerian yang dalam kurun waktu lima tahun terakhir sub sektor hortikultura yakni buah manggis.

Syarat ekspor manggis antara lain berasal dari kebun yang telah terintegrasi, rumah kemas terintegrasi dan dijamin bebas dari organisme pengganggu tanaman atau OPT baik serangga hidup kutu putih dan semut serta adanya standarisasi yang diinginkan oleh Tiongkok terhadap ekspor manggis asal Indonesia. Adanya standarisasi yang diterapkan oleh Tiongkok membuat Indonesia sulit untuk mengikuti standarisasi tersebut. Standarisasi ini muncul akibat adanya ekspor komoditas manggis asal Indonesia mengandung hama yakni *cadmium* yang melebihi persyaratan dari AQSIQ. Hambatan dari pihak Tiongkok hingga memberhentikan ekspor manggis sejak tahun 2013 lalu dan telah mengakibatkan adanya penurunan ekspor manggis hingga tahun 2016.

Selain perbaikan kebun dan meningkatkan kualitas buah manggis Indonesia juga melakukan diplomasi melalui tahapan - tahapan diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam pertemuan SPS (*sanitary and phytosanitary*). Sebelum ikut dalam pertemuan SPS guna membahas masalah dengan Negara Tiongkok, Indonesia melakukan permintaan kepada pihak karantina Tiongkok AQSIQ untuk melakukan pengecekan secara langsung ke kebun manggis di Indonesia. Setelah dilakukannya pengecekan tahun 2014 Tiongkok belum memberikan hasilnya. Lalu pada pertemuan SPS Pada sidang ke 62 pada 25 maret tahun 2015 Indonesia membahas mengenai hasil assessment-nya kepada Tiongkok. Namun pada sidang tersebut belum disampaikan bagaimana hasil dari kunjungan Tiongkok ke Indonesia. Dilanjutkan kembali adanya pertemuan-pertemuan Indonesia menyempatkan adanya pertemuan bilateral dengan Tiongkok untuk membahas ekspor manggis namun pihak Tiongkok menyampaikan bahwa Indonesia harus mengacu kepada persyaratan *sanitary and phytosanitary*. Pada 2016 Indonesia dan Tiongkok melakukan pembahasan protocol manggis yang disepakati bersama. Pada pertemuan SPS ke 68 Indonesia meminta Tiongkok untuk menandatangani Protokol yang telah disepakati bersama namun Tiongkok belum ingin menandatangani dokumen tersebut. Pada Maret 2017 pertemuan SPS-WTO di jenewa, Indonesia menyampaikan bahwa telah melakukan perbaikan dengan standard persyaratan sps serta melakukan pengecekan laboratorium. Karena tidak adanya respon positif dari Tiongkok sejak pertemuan Komite SPS yang lalu, Indonesia ingin kembali menyampaikan keprihatinan (*serious concern*) terhadap larangan impor buah manggis segar asal Indonesia.

Lalu dengan upaya perbaikan dari dalam negeri dan dengan diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia melalui forum pertemuan sidang SPS selama 5 tahun ini Pemerintah Tiongkok telah mengizinkan kembali Indonesia untuk melakukan ekspor manggis setelah sempat mengeluarkan larangan selama empat tahun karena dianggap tidak memenuhi standar baku mutu. Protokol manggis ditandatangani Badan Karantina Pertanian Kementan RI dan Badan Karantina Tiongkok (AQSIQ) pada 11 Desember 2017. Ekspor manggis ke Tiongkok terbukti mendongkrak harga manggis petani hingga tiga kali lipat dari harga domestik setelah memenuhi standar SPS. Untuk mendapat harga yang tinggi,

produk pertanian harus memenuhi standar SPS agar diterima di negara tujuan ekspor terutama Negara Tiongkok, seperti halnya manggis, untuk menembus pasar Tiongkok harus memenuhi standar baku mutu yang tertuang dalam protokol impor manggis yang disepakati oleh lembaga karantina Tiongkok dan Indonesia. Setelah adanya Diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia ekspor manggis ke Tiongkok mulai adanya peningkatan terhitung sejak Januari-Mei 2018.

## VI.2 SARAN

Indonesia perlu meyakini bahwa buah manggis adalah buah yang eksotis, tidak banyak ditemukan di negara lain dan memiliki banyak khasiat, termasuk untuk kesehatan. Yang perlu dikembangkan adalah kualitas dari buah manggis itu sendiri. Untuk itu agar pemberhentian ekspor buah tidak dialami kembali oleh Indonesia, Indonesia harus perlu melihat buah-buahan yang menjadi unggulan ekspor ke Negara-negara penerima seperti buah manggis, agar dapat dijaga kualitas dan produktivitasnya dan dapat terus melakukan ekspor ke Negara luar serta dapat memenuhi standard mutu dari setiap permintaan Negara tujuan ekspor. Karena pasar dalam negeri dan ekspor sangat terbuka untuk produk buah manggis asal Indonesia.

Melalui pertemuan SPS (*Sanitary and Phytosanitary*) perjanjian ini mengatur tentang aplikasi keamanan pangan (*food safety*) dan peraturan mengenai kesehatan tumbuhan dan hewan (*quarantine*). Perjanjian ini memberikan ruang peran kepada karantina pertanian menjadi semakin strategis. Perkembangan isu-isu di Sidang Komite SPS semakin tinggi mengingat banyaknya negara anggota WTO yang memanfaatkan forum ini untuk menyelesaikan permasalahan SPS dengan negara mitra dagang. Untuk itu Indonesia diharapkan lebih berperan aktif dalam Sidang Komite SPS berikutnya, tidak hanya terhadap isu yang menjadi *concern* Indonesia tetapi juga mendukung *concern* negara lain yang memiliki dampak juga terhadap Indonesia. Karena dengan adanya forum pertemuan seperti SPS membuat mudah untuk Negara-negara yang mengalami masalah diselesaikan melalui sidang pertemuan SPS.